

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMBERDAYAAN SUKU LAUT DI DUSUN LINAU BATU, DESA TANJUNGKELIT, KABUPATEN LINGGA, PROVINSI KEPRI

Marisa Elsera

Sosiologi, FISIP, Universitas Maritim Raja Ali Haji
marisaelsera@umrah.ac.id

ABSTRAK

Suku Laut di Dusun Linau Batu, Desa Tanjungkelit, Kabupaten Lingga awalnya hidup nomaden, pindah dari satu pulau ke pulau yang lain dengan menggunakan sampan yang sekaligus dijadikan sebagai tempat tinggal mereka kini sudah menetap. Jika pada dahulunya mereka terisolir karena kultural, sejak dirumahkan mereka juga terisolir secara struktural. Tahun 2015, Suku Laut di Kepri tidak lagi dikategorikan sebagai Komunitas Adat Terpencil setelah Dinas Sosial Kepri menyatakan Kepri bebas KAT dan menyurati Kementerian Sosial, Direktorat KAT. Hal ini berimbas pada tidak tersentuhnya Suku Laut dari program kemiskinan dan keterisoliran. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai aspek kehidupan sosial-budaya, masalah-masalah sosial dan menyusun prioritas pemberdayaan yang akan dilaksanakan pada Suku Laut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan cara memperoleh data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bentuk pengabaian kepada masyarakat Suku Laut. Mereka mengalami persoalan sosial, ekonomi, akses, kelembagaan dan kultural. Tidak diakuinya lagi mereka sebagai komunitas adat terpencil menyebabkan perhatian dan bantuan pemerintah daerah maupun pusat menjadi sangat minim, bahkan untuk beberapa aspek belum terjamah, seperti keahlian melaut masih tradisional menggunakan perahu dayung, pancing dan tombak sebagai alat tangkap. Dampaknya, kehidupan mereka tak pernah lepas dari hutang.

Kata kunci: Suku laut, terisolir, kemiskinan

ABSTRACT

Suku Laut tribe in Linau Batu Hamlet, Tanjungkelit Village, Lingga Regency originally lived as a nomad, moving from one island to another by using a sampan which at the same time served as their residence has now settled. Since long ago, they were isolated because of cultural factors, but since the government program laid off, they were also structurally isolated. Since 2015, Suku Laut are no longer registered as indigenous communities. The isolation and poverty of the Suku Laut is caused by the low attention of the government (untouched by development) and the stereotypes of the local community towards Suku Laut people which make them more retarded. This research is intended to identify various aspects of socio-cultural life, social problems and develop empowerment priorities that will be implemented in Suku Laut. The method used is qualitative by obtaining interview data, observation and documentation. Results of this research found that even though Suku Laut is now settled, it has been recorded administratively, but in fact there are still identified forms of neglect to them. One of them is that they are no longer recognized as remote indigenous communities so that the attention and assistance of local and central government is very minimal, even for some untouched aspects, such as traditional fishing skills using rowing boats, fishing rods and spears as fishing gear. As a impact, their lives have never been separated from debt.

Keyword: Suku laut, isolated, poverty

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan perubahan sosial yang disengaja. Pembangunan meliputi penyediaan sarana fisik seperti pembuatan jalan raya untuk membuka akses antar wilayah, pembuatan saluran air, dan banyak hal lain yang sudah biasa dilihat datanya. Pembangunan non fisik meliputi berbagai macam kegiatan yang dilakukan lebih kepada peningkatan kapasitas individual dan kelompoknya seperti pemberantasan buta aksara, buta angka, program-program pemberdayaan padat karya yang mengutamakan pengembangan skill masyarakat, dan lain sebagainya.

Pembangunan harus merata. Sehingga, tidak ada elemen masyarakat yang mengalami kelambanan pembangunan, termasuk juga masyarakat terpencil yang kurang terjamah oleh pembangunan. Salah satu elemen masyarakat yang kurang mendapatkan *impact* dari pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau adalah masyarakat Suku Laut, kelompok ini merupakan salah satu suku asli yang mendiami provinsi Kepulauan Riau. Sebarannya hampir merata ada di setiap Kabupaten Kota yang ada di provinsi Kepri. Meski jumlahnya tak selalu sama antara kabupaten/kota yang satu dengan yang lainnya. Umumnya mereka hidup berkelompok dengan sesama mereka, dan biasanya dalam jumlah yang tak terlalu besar.

Suku Laut awalnya hidup nomaden. Pindah dari satu pulau ke pulau yang lain, menggunakan Sampan yang sekaligus dijadikan sebagai tempat tinggal mereka. Sampan-sampan yang sekaligus dijadikan sebagai tempat tinggal tersebut beratapakan Kajang. Kajang merupakan atap rumah sampan yang terbuat dari daun pandan maupun daun Rumbi atau sebagian lain menyebutnya Rumbia. Kehidupan mereka sangatlah bergantung pada laut, sangat tradisional, dan mereka dikenal tidak menganut agama (animisme). Meskipun jika melihat kondisi hari ini, banyak di antara mereka yang telah menganut agama tertentu, seperti Islam, Kristen, maupun Budha seperti yang ditemui di Kabupaten Lingga dan kabupaten Karimun. Dan sebagian telah beralih tempat tinggal di rumah-rumah yang di sediakan pemerintah melalui program pembangunan rumah bagi mereka. Meski kehidupan Suku Laut sendiri masih sulit di pisahkan dari kebiasaan-kebiasaan aslinya yang sangat serta hubungannya dengan laut.

Suku Laut hidup di Sampan dan memiliki sampan lain untuk mencari hasil laut. Sampan-sampan ini bukanlah sampan yang di gerakkan dengan mesin melainkan adalah sampan yang di gerakkan dengan sepasang dayung untuk menggerakkannya. Dua jenis Sampan yang terkenal digunakan oleh Suku Laut adalah Sampan Kolek dan Sampan Brena. Sampan Brena lebih sering digunakan untuk mencari ikan. Berbeda dengan sampan Kolek yang dipakai untuk tempat tinggal Suku Laut.

Suku Laut di Kepri hampir semua telah berpindah tempat tinggal ke daratan. Informasi yang di himpun dari Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, komunitas tersebut berpindah tempat tinggal melalui program bantuan Rumah layak Huni yang dianggarkan oleh Pemerintah. Meski kadang sebagian mereka jika malam hari memilih untuk kembali ke rumah asli mereka, bukan yang bantuan pemerintah. Seperti yang di temui di desa Kelumu, Kabupaten Lingga. Di kabupaten Bintan, tepatnya di desa Berakit, keberadaan Suku Laut sudah menempati pemukiman yang di sediakan pemerintah. Di kota Batam, sebagian mereka masih kembali lagi ke sampan, meski tidaklah banyak.

Berdasarkan sejarah, keberadaan Suku Laut bahkan sudah ada sejak masa penjajahan. Suku Laut ikut membantu Kerajaan Melayu dalam melawan penjajah yang berusaha menguasai tanah melayu ketika itu. Lepas dari zaman imperialism Belanda, keberadaan Suku Laut semakin terdesak dan jauh dari pembangunan, bahkan sempat menjadi suku yang terkategori sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT). Sebagaimana Peraturan Presiden nomor 186 tahun 2014, Suku Laut diakui sebagai salah satu Komunitas Adat terpencil (KAT) yang ada di Indonesia.

Komunitas ini termasuk dalam sekumpulan orang yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi dan atau rentan secara sosial dan ekonomi. Karena masalah keterpencilan serta kemiskinan, maka KAT merupakan salah satu yang dianggap sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta memerlukan penanganan khusus agar dapat hidup setara degan warga negara Indonesia lainnya (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan KAT, hal 1).

Kementerian Sosial sendiri merillis kriteria KAT dalam pelaksanaan beberapa program yang di sasarkan kepada kelompok tersebut. Kriteria KAT meliputi :

- 1) Keterbatasan akses pelayanan dasar
- 2) Tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung pada alam
- 3) Marjinal di perdesaan dan perkotaan,
- 4) Tinggal di wilyah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terlur dan terpencil.

Kementerian Sosial sendiri memiliki program pemberdayaan untuk KAT tersebut. Melalui Kementerian Sosial, KAT masuk dalam program pemberdayaan yang di maksudkan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompoknya. Terdapat kategori-kategori dengan jangka waktu tertentu program pemberdayaan. Kegiatan pemetaan KAT ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai aspek kehidupan sosial-budaya, masalah-masalah sosial dan menyusun prioritas pemberdayaan yang akan dilaksanakan pada Suku Laut.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apa permasalahan Masyarakat Suku Laut di Dusun Linau Batu, Desa Tanjungkelit, Kab. Lingga?
2. Bagaimana gagasan pemberdayaan yang bisa dilakukan pada masyarakat Suku Laut di Dusun Linau Batu, Desa Tanjungkelit, Kabupaten Lingga?

METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana yang diteliti adalah gambaran kehidupan dan tindakan manusia dalam interaksi sosialnya. Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Seperti penelitian sosial pada umumnya, data yang disajikan dalam laporan penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya atau orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan mekanisme disengaja (*purposive*) dalam mencari informan penelitian. Dalam penelitian ini gejala yang diteliti adalah bagaimana keterisolan pada masyarakat Suku Laut di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun karakteristik dalam pemilihan informan adalah sebagai berikut:

- a) Masyarakat asli Suku Laut yang mendiami Provinsi Kepri.
- b) Tokoh masyarakat dan tokoh adat Suku Laut.
- c) Dinas Sosial Provinsi Kepri

Teknis Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis sesuai dengan konsep Miles dan Huberman (dalam Afrizal.2005), yaitu:

- 1) Reduksi Data, yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 'kasar' yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, dimana ada data yang perlu diperhatikan dan ada yang tidak.
- 2) Penyajian Data, yaitu menyusun sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- 3) Menarik kesimpulan atau verifikasi, yaitu menguji kesimpulan data dari berbagai keabsahan. Dalam hal ini dapat dilakukan triangulasi; informasi dikumpulkan dari sumber-sumber yang berbeda agar tidak bias sebuah kelompok.

Sesuai dengan penelitian ini, maka seluruh data yang dikumpulkan dari observasi, wawancara dan FGD disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif serta dianalisa secara kualitatif untuk mendeskripsikan keterisoliran masyarakat Suku Laut di Provinsi Kepulauan Riau.

KERANGKA TEORI/KONSEP

Komunitas Adat Terpencil

KAT merupakan sebuah kelompok sosial budaya yang secara geografis bertempat tinggal di daerah terpencil, terisolir dan sulit dijangkau. Kondisi demikian mengakibatkan terbatasnya akses terhadap dunia luar. Kedudukan ini menjadi salah satu faktor terbatasnya aksesibilitas pelayanan sosial dasar, sehingga mereka tertinggal perkembangannya dibandingkan dengan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencil serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik (Keppres Nomor 111 Tahun 1999). Sebagaimana komunitas lainnya, KAT juga mengalami berbagai masalah sosial dan bahkan lebih bervariasi dan lebih kompleks dilihat dari berbagai sudut pandang warga KAT pada umumnya bertempat tinggal jauh di pedalaman di tengah hutan belantara, di dataran tinggi atau pegunungan, di rawa-rawa, di pesisir pantai, di pulau-pulau terpencil, dan di daerah perbatasan dengan Negara tetangga. Secara geografis maupun sosial budaya habitat KAT dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, masih berkelana, menetap sementara, dan menetap.

Dalam mempertahankan hidupnya, warga KAT umumnya mengandalkan sumber dan potensi alam dengan menggunakan penerapan teknologi sangat sederhana. Permasalahan sosial yang dihadapi warga KAT tidak terletak pada kebiasaan hidup yang telah mereka jalani, akan tetapi diukur dari derajat kelayakan hidup yang memungkinkan mereka tetap mempertahankan keberlangsungan hidupnya (*survival*), membangun peradaban sendiri (*civilization*) serta memenuhi martabat kemanusiaan (*human dignity*) dan hak-haknya yang layak bagi kemanusiaan (*human right*) dalam kesatuan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Abraham Maslow (dalam Richard L. Daft, 2002) berpendapat ada 5 (lima) hierarki kebutuhan manusia, yaitu (1) Fisiologi (*physiological needs*), yaitu kebutuhan fisik manusia yang paling mendasar seperti pangan, sandang perumahan, udara, dan air termasuk kebutuhan seks, (2) Kebutuhan keamanan (*safety needs*) adalah kebutuhan untuk keselamatan dan jaminan lingkungan fisik, emosional, dan kebebasan dari adanya ancaman. (3) Kebutuhan penerimaan (*belongingness needs*) adalah kebutuhan yang merefleksikan hasrat untuk diterima oleh sesama,

menjadi ikatan sekawan dan menjadi bagian dari kelompok. (4) Kebutuhan penghargaan (*esteem needs*) yaitu kebutuhan untuk memiliki kesan positif dan menerima perhatian, penyaluran dan apresiasi dari orang lain. (5) Kebutuhan aktualisasi diri (*self actualization needs*) merupakan kebutuhan yang menekankan pada potensi dan peningkatan kompetensi seseorang.

Strategi pemberdayaan KAT adalah menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung KAT untuk dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial budaya, ekonomi dan politik. Dalam pelaksanaan strategi tersebut, maka pendekatan yang digunakan adalah :

- a) Pemberdayaan, yang mengandung makna untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya serta pemberian kepercayaan dan peluang kepada masyarakat, dunia usaha dan KAT untuk mencegah dan mengatasi masalah yang ada di lingkungannya.
- b) Kemitraan, yang mengandung makna adanya kerjasama sesuai dengan program, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan, kolaborasi dan jaringan kerja yang menumbuhkan kembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra dengan KAT.
- c) Partisipasi, yang mengandung makna adanya prakarsa dan peranan dari KAT dan lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan serta melakukan pilihan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan sosialnya.
- d) Advokasi sosial, yang mengandung makna perlindungan terhadap berbagai sumberdaya yang dimiliki untuk meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup KAT.

Suku Laut

Masyarakat Suku Laut hidup dalam sebuah sampan di atas laut dan menjalani seluruh proses kehidupan di dalam sampan. Tidak hanya makan, minum, buang air, tapi juga berhubungan intim dan melahirkan. Mungkin bagi kita yang terbiasa hidup menetap dalam sebuah rumah di daratan, hal tersebut terasa begitu berat dilakukan. Tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan Suku Laut Desa Kelumu mulai dari lahir, besar, makan, tidur, memasak, menikah, dan proses reproduksi pun dilakukan di atas sampan yang mereka istilahkan dengan kajang.

Kajang adalah sebuah sampan kecil yang hanya berukuran 3×1 meter. Di bagian atasnya diberi sirap atau atap dari daun kelapa dengan tinggi sekitar 75 cm. Di atas sampan itulah, mereka membagi setiap bagian menjadi ruang layaknya ruang di daratan. Bedanya, setiap ruang tidak berdinding hanya dibatasi dengan perlengkapan hidup. Dapur, diletakkan di bagian belakang sampan. Untuk memasak mereka menggunakan lempengan besi sebagai alas kayu bakar. Sedangkan untuk tunggunya mereka gunakan kaleng bekas yang bagian sampingnya diberi

lubang untuk memasukkan kayu bakar. Lebar tungku tersebut hanya sekitar 15 cm. Api mereka dapatkan dengan menggunakan gesekan batu atau kayu.

Sementara untuk istirahat, mereka jadikan bagian tengah sampan, yang merupakan bagian terlebar, sebagai tempat menggelar tikar. Di atas sampan yang berukuran kecil tersebut, bisa dihuni satu keluarga dengan jumlah anak tiga sampai lima orang. Bagaimana mereka tidur? Jangan pernah membayangkan mereka tidur dengan posisi terlentang dan datar dari ujung kaki sampai kepala. Agar sampan bisa memuat tidur semua anggota keluarga, mereka beristirahat dengan posisi badan melengkung, kepala di sisi kanan sementara kaki di sisi kiri. Pola hidup yang dijalani Suku Laut ini, telah mempengaruhi postur tubuh mereka. Rata-rata tinggi Suku Laut tidak lebih dari 1,4 meter.

Masyarakat Suku Laut hanya mengenal keluarga inti atau *nuclear family*. Keluarga inti merupakan kelompok sosial terkecil dalam kehidupan masyarakat. Dalam keluarga tersebut terdiri dari seorang ayah, seorang ibu dan beberapa orang anak. Suku Laut ini hidup berkelompok-kelompok, satu kelompok bisa sampai sepuluh sampan yang dan juga memiliki ketua kelompok. Satu sampan atau kajang biasanya dihuni satu keluarga, anak-anak mereka yang masih kecil berada di bawah usia 10 tahun masih bisa tinggal satu sampan dengan ayah dan ibunya. Akan tetapi jika anak-anak mereka, terutama laki-laki, telah beranjak remaja akan dibuatkan kajang sendiri oleh sang ayah. Di atas kajang itulah kehidupan mandiri seorang Suku Laut dimulai. Si remaja akan belajar mencari ikan sendiri guna memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk memasak sendiri.

Di atas kajang itu pula, ia akan mulai mencari pasangan hidup dan hidup bersama membentuk keluarga baru. Begitu seterusnya siklus kehidupan Suku Laut berjalan. Sementara bagi anak perempuannya yang telah remaja tetap tinggal bersama orang tuanya, sampai ada pemuda yang melamar dan menikahnya. Setelah menikah anak perempuan berpisah dengan ibu-bapaknya dan tinggal satu rumah dengan suaminya.

PEMBAHASAN

Dusun Linau Batu, Desa Tanjungkelit berada di ruang wilayah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki luas wilayah daratan dan lautan (berdasarkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau) mencapai 211.772 km² dengan luas daratan 2.117,72 km² (1 %) dan lautan 209.654 Km² (99%), dengan jumlah pulau 531 buah pulau besar dan kecil, serta 447 buah pulau diantaranya belum berpenghuni.

Dusun Linau Batu merupakan kecamatan Senayang dengan wilayah paling padat hunian diantara kecamatan lainnya di Kabupaten Lingga. (table 1). Dusun Linau Batu merupakan salah satu dari dua dusun yang ada di Desa Tanjungkelit (satu diantara 11 desa yang ada di Kecamatan Senayang. Berikut ini jumlah pulau dan luas wilayah Kabupaten Lingga.

Tabel 1. Jumlah Pulau dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lingga

No	Kecamatan	Banyaknya Pulau			Luas (Km ²)			Jumlah	
		Sudah dihuni	Belum dihuni	Jml	Daratan	Lautan	Jumlah	Desa	Kel
1	Singkep Barat	12	40	52	450,43	2.503,04	2.953,47	8	1
2	Singkep	4	32	36	384,15	3.231,40	3.615,56	9	2
3	Lingga	9	60	69	558,70	11.005,97	11.564,67	17	1
4	Lingga Utara	1 ¹⁾	12	12	354,76	4.347,49	4.702,25	7	1
5	Senayang	59	303	362	487,47	22.185,24	22.672,71	10	1
Jumlah		84	447	531	2.235,51	43.273,15	45.508,66	51	6

Sumber : BPS Kabupaten Lingga Tahun 2017

Sebagai desa keempat terluas di Kecamatan Senayang, Desa Tanjungkelit memiliki 2 dusun, 5 RW dan 12 RT. Suku laut yang ada di Dusun Linau Batu ini saja ada 193 orang, dengan jumlah KK 71 orang.

Permasalahan Suku Laut

Kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat suku laut itu sangat memprihatinkan karena mereka memiliki beberapa masalah, diantaranya:

a) Sumber Air Bersih Minim

Sumber air bersih di Dusun Linau Batu berasal dari 1 sumur yang digunakan bersama oleh puluhan KK yang ada. Air sumur itu digunakan untuk mandi, mencuci, masak dan minum. Karena kesulitan air bersih, mereka jarang mandi. Kadang bisa mandi 2-3 hari sekali.

b) Kurangnya Jumlah dan Buruknya Kondisi Tempat Tinggal

Tempat tinggal Pada tahun 2018 penduduk Dusun Linau berjumlah 193 jiwa, dengan jumlah KK 71. Sebanyak 48 KK sudah mendapatkan bantuan rumah, sisanya 23 belum mendapatkan rumah.

c) Perempuan Suku Laut Belum Berdaya

Perempuan Suku Laut di Dusun Linau Batu hampir 50 % dari populasi total masyarakat Suku Laut di Dusun Linau ini. Namun sayangnya para perempuan Suku

Laut belum berdaya sehingga hanya menunggu hasil tangkapan suami setiap harinya untuk kemudian di masak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya skill yang dimiliki perempuan Suku Laut sehingga belum bisa produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Keseharian mereka hanya di rumah. Berikut ini tabel penduduk Suku Laut berdasarkan pekerjaan.

Tabel 2. Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Dusun dan Desa	Jumlah
Melaut	101
Ibu Rumah Tangga	92
Total	193

Sumber : Data Olahan 2018

d) Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Buta Huruf

Keterisoliran mereka secara struktur dan secara budaya membuat masyarakat Suku Laut Dusun Linau Batu tidak hanya mengalami kemiskinan tapi juga buta huruf. Mayoritas diantara mereka tidak bisa membaca dan menulis, pun begitu dengan kesempatan memperoleh pendidikan yang sangat jarang. Beruntungnya di Dusun Linau Batu sudah dibangun Sekolah Dasar sehingga masyarakat Suku Laut terbantu untuk merasakan pendidikan. Sayangnya untuk melanjutkan pendidikan ke SMP mereka harus menyeberang laut ke Desa Tanjungkelit dan untuk melanjutkan ke SMA harus menyeberang laut ke Daik. Berikut ini tabel penduduk berdasarkan pendidikan:

e) Potensi Sumber Daya Manusia Rendah

Potensi Sumber Daya Manusia menjadi modal yang paling utama untuk dapat mengembangkan Sumber Daya Alam yang ada. Dari hasil Penjajagan Awal dan Studi Kelayakan potensi ini merupakan langkah awal untuk menjadikan Analisis Kebijakan Pembangunan Sosial. Khusus Suku Laut di Linau Batu, ditemukan hasil sebagai berikut:

- 1) Keterampilan satu-satunya yang dimiliki oleh masyarakat Suku Laut Dusun Linau adalah menganyam kajang (tutup perahu yang terbuat dari pandan). Keterampilan ini jika hanya dikhususkan untuk pembuatan kajang maka akan tidak produktif, namun jika disinergiskan dengan program Kabupaten Lingga yang mana sedang mempromosikan tudung saji dari anyaman pandan, maka tentu masyarakat Suku Laut bisa menambah penghasilan dari usaha ini.

- 2) Kesenian merupakan bagian dari budaya dan sarana yang digunakan sebagai hasil ekspresi keindahan. Remaja putri dan putra Suku Laut memiliki bakat dalam hal seni tari. Mereka sering diajarkan menari dan melakukan pentas seni di sekolah.

Sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam pengembangan sebuah komunitas. Keberadaan sumber daya manusia merupakan pertanda adanya perubahan dari masa lalu ke masa yang akan datang. Masyarakat adalah fenomena antar waktu, dimana ada dengan melalui waktu, bukan karena jelmaan dari waktu. Maka, manusia dalam sebuah komunitas adalah sebuah keterkaitan yang tak bisa di lepas antara satu dengan yang lain.

Komunitas merupakan satu unit atau kesatuan sosial, yang terorganisir dalam kelompok dan kepentingan bersama. Baik secara fungsi maupun teritorial wilayah. Dalam batas tertentu, komunitas bisa saja berwujud dusun, desa, kota maupun suku. Keberadaan anggota masyarakat dalam kelompok, hidup secara bersama dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Kelompok inilah yang kemudian disebut sebagai komunitas, mereka yang menempati wilayah tertentu dengan batas teritorial tertentu pula. Di perlukan pengembangan masyarakat dalam upaya meningkatkan kapasitas komunitas tersebut.

Dewasa ini, Selain berkembang secara revolutif, masyarakat juga berkembang secara evolutif. Terdapat karakteristik-karakteristik masyarakat yang secara tradisional menurut M.Francis Abraham (Raharjo, hal 24), seperti :

- a. Berpindah-pindah
- b. Teknologi primitif
- c. Sumber energi yang hidup
- d. Pembagian kerja yang sederhana
- e. Solidaritas mekanik
- f. Memiliki semangat kerakyatan
- g. Organisasi secara komunal
- h. Status berdasarkan keturunan
- i. Pembagian kerja yang sederhana pada komunitas suku laut memang sangatlah sederhana.

Masyarakat Suku laut Dusun Linau Batu, Desa Tanjungkelit Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga sekarang tak lagi hanya mencari ikan. Sekelompok dari mereka tak

hanya mencari ikan dan berburu, mencari kayu dan membuat kerajinan atap dari daun rumbia. Atap daun rumbia biasanya untuk kebutuhan mereka sendiri, guna mengganti atap bagian rumah mereka. Hal itu dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

f) Pranata Politik dan Kelembagaan Adat Lemah

Masyarakat Suku Laut umumnya memiliki hubungan persaudaraan antara yang satu dengan yang lainnya. Bersifat homogen dan komunal. Dalam beberapa hal, tokoh adat memiliki peran yang sangat penting. Tokoh adat adalah seseorang yang memiliki jabatan adat dan sangat berperan dalam suatu tatanan masyarakat adat di satu wilayah tertentu. Pada masyarakat Suku Laut, tak semua kelompok Suku Laut di beberapa titik yang ditemukan memiliki tokoh adat. termasuk di Desa Linau Batu, kepala adat baru saja meninggal. Semasa hidupnya, perannya pun sangatlah besar, dalam beberapa hal seperti pengurusan Kartu tanda Penduduk (KTP) ataupun urusan administrasi lainnya yang menyangkut data kependudukan, umumnya diakomodir oleh kepala suku atau juga sebagai tokoh adat disana. Pemilihan tokoh adat biasanya didasarkan pada usia dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang di lingkungan tersebut.

Keberadaan mereka bahkan tidak terlalu diketahui oleh masyarakat, kecuali hanya oleh sebagian kecil, bisa dikatakan bahwa tokoh adat tidak memiliki peran signifikan terkait kehidupan mereka dan aktifitas mereka sehari-hari. Tokoh adat tak lagi berperan dalam semua keputusan kolektif Suku Laut. Namun, keberadaannya tetap menjadi sosok yang di hormati. Pemerintahan desa selama ini menjadi wadah bagi masyarakat sebagai lembaga resmi.

Kelembagaan adat Suku Laut sangat sederhana sekali, meskipun sudah ada kelembagaan adat yang secara turun temurun sejak zaman penjajahan, namun peran kelembagaan adat ini masih sangat kurang. Kelembagaan adat Suku Laut baru nampak hanya untuk acara-acara seremoni seperti pernikahan dan kematian, itupun tidak begitu terlibat. Jika dulu banyak sekali ritual-ritual yang dilakukan oleh Suku Laut, maka tidak dengan sekarang. Suku Laut lambat laun sudah mulai meninggalkan ritual-ritual yang di tinggalkan oleh nenek moyang mereka. Seperti ritual pernikahan yang ada dilingkungan mereka. Pernikahan mereka dahulu, dilakukan hanya secara adat. Tidak mengikuti ajaran agama karena dahulu mereka belum mengenal agama, dan belum mencantumkan sebagai identitas mereka. Informasi yang dihimpun dari masyarakat Desa Linau Daik Lingga, mereka mengaku bahwa dahulu ketika menikah hanya

dilakukan secara adat. Kedua orangtua mempelai bertemu. Jika setuju, maka keesokan harinya dua keluarga tersebut bersepakat untuk mengundang tetangga mereka, guna hadir dalam kenduri. Proses tersebut sebagai bagian dari cara mengumumkan pernikahan tersebut, agar lingkungan sekitar mengetahui dan tidak menimbulkan kecurigaan oleh masyarakat.

Dalam rangka menciptakan *good governance* di suatu Negara, hendaknya mampu mendekatkan antara unsur pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah hendaknya menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada swasta dan masyarakat sehingga keduanya dapat mengambil porsi yang tepat dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai proses penyerhan kekuasaan dari pemerintah kepada pihak yang tidak berdaya, supaya dapat memiliki kekuatan untuk membangun serta meningkatkan daya masyarakat miskin sehingga memiliki kemampuan untuk membangun.

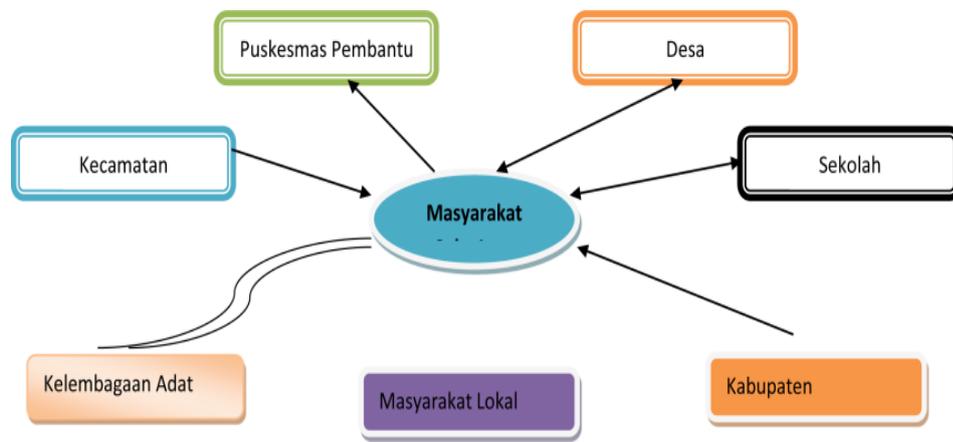
Masyarakat Suku Laut memiliki ciri ketidakberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Masyarakat ini secara materil belum mampu mencukupi kebutuhan hidup minimal yang diperlukan sebagai manusia wajar. Mereka mengalami keterbatasan di lingkungan sosialnya baik untuk melakukan sosialisasi, interaksi secara vertical bahkan untuk menjalin network ke luar dari lingkungannya. Mereka secara kultural mendapatkan perlakuan yang tidak setara dan dipandang undergrade dalam segmentasi atau struktur sosial. Secara politis, mereka juga tidak memiliki peluang untuk melakukan negosiasi terhadap kebijakan diberlakukan di wilayahnya, bahkan kebijakan yang mengintervensi di banyak segi kehidupan mereka sekalipun.

Hubungan sosial masyarakat Suku Laut dengan masyarakat lokal tidak begitu intens disebabkan karena; pertama, lokasi tempat tinggal mereka yang cukup jauh dari masyarakat sekitar. Kedua, karena memang ada keengganan bagi masyarakat Suku Laut untuk berinteraksi masyarakat lokal yang disebabkan oleh rasa takut, malu, minder sehingga harus difasilitasi oleh kepala sukunya jika mau berurusan dengan masyarakat lokal dan pemerintah. Ketiga, *stereotype* yang menempel pada masyarakat Suku Laut yang jorok, kumuh, kotor, jarang mandi, memelihara binatang haram sehingga masyarakat lokal membatasi intensitas berkomunikasi dengan mereka.

Adapun hubungan sosial masyarakat Suku Laut dengan lembaga pemerintah masih minim. Pada umumnya mereka belum cukup intens untuk memanfaatkan pelayanan publik. Jika ada urusan yang berhubungan dengan pelayanan publik, biasanya

mengharuskan aparat pemerintah turun langsung ke pemukiman masyarakat Suku Laut atau didampingi oleh kepala suku untuk melakukan pengurusan ke pemerintahan. Oleh karena ada tuntutan melengkapi administrasi kependudukan, maka setiap jiwa wajib memiliki KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan sebagainya. Mayoritas masyarakat Suku Laut memiliki KTP, namun sebagian diantaranya belum memiliki kartu keluarga dan buku nikah. Berikut karakteristik jaringan hubungan sosial dan dukungan kelembagaan masyarakat Suku Laut:

Bagan 1. Karakteristik Jaringan Hubungan Sosial dan Kelembagaan



Keterangan:

- ↔ = Punya hubungan resiprositas
- = Punya hubungan satu arah
- ~ = Kurang Sinergis

Oleh karena itu, diperlukan peran dari berbagai elemen masyarakat untuk terlibat dalam pemberdayaan bagi masyarakat Suku Laut. Berikut rancangan peran keempat actor pemberdayaan Masyarakat Suku Laut:

g) Tidak Ada Kepemilikan dan Sistem Penguasaan Wilayah

Suku Laut Dusun Linau menempati satu wilayah dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Yakni 71 KK. Suku laut sudah memiliki rumah, mereka tak lagi tinggal di Sampan. Rumah-rumah tersebut menurut pengakuan mereka adalah rumah yang didapat melalui bantuan pemerintah. Meski, masih terdapat beberapa KK di beberapa titik lokasi yang belum memiliki rumah, namun hal tersebut dikarenakan mereka adalah rumah tangga baru, pasangan yang baru menikah, yang pada saat program bantuan rumah tersebut hadir, mereka masih tinggal bersama orangtua mereka dengan status belum menikah. Dalam satu rumah, Suku Laut memiliki anggota keluarga rata-rata 2-6 jiwa.

Lahan yang didiami merupakan lahan adat, dimana sudah diberikan hak guna untuk bisa ditinggali oleh suku laut dari Pemerintah Kabupaten Lingga. Rumah yang dibangun dengan bantuan pemerintah dalam program RTLH maupun dari swadaya sendiri.

h) Pendampingan Pemuka Agama Minim

Berdasarkan sejarah, masyarakat Suku Laut pada awalnya animism dan tidak memeluk agama. Kemudian, setelah dimukimkan dan beradaptasi, masyarakat setempat dan mendapatkan pelayanan administrative dari pemerintahan kecamatan dan desa, akhirnya masyarakat Suku Laut pada akhirnya memiliki agama. Adapun agama yang dipeluk oleh masyarakat Suku Laut cukup beragam, yakni Katolik, Islam dan Budha. Agama yang mereka peluk sesuai dengan siapa yang mendekati dan menjadi fasilitator bagi mereka. Seperti halnya Suku Laut di Dusun Linau Batu, Kabupaten Lingga memeluk agama Katolik karena mendapatkan bimbingan dari seorang Pendeta, sebagian lagi dibimbing oleh Ustadz sehingga sebagian ini pun memeluk Agama Islam. Disana dibangun pula satu buah Gereja dan satu Mushalla. Pada dasarnya, mayoritas masyarakat Suku Laut sudah memiliki agama karena itulah persyaratan untuk mengurus KTP dan KK.

i) Akses Pranata Kesehatan Jauh

Masyarakat Suku Laut belum memanfaatkan sarana kesehatan. Adapun alasannya; pertama karena jarak yang cukup jauh dari pusat kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu. Mereka harus menggunakan perahu 30 menit ke Daik untuk mendapatkan perawatan kesehatan. Kedua, karena sebagian besar masyarakat Suku Laut masih percaya pada dukun dan bidan kampung dalam mengobati penyakitnya. Mereka percaya bahwa sakit yang mereka rasakan bisa diobati oleh dukun kampung, jika sudah disarankan dukun untuk berobat ke dokter (biasanya jika sudah sakit parah), maka barulah masyarakat Suku Laut berobat ke rumah sakit, puskesmas dan pustu. Ketiga, karena petugas kesehatan tidak selalu berada di pustu sehingga masyarakat Suku Laut yang ingin berobat jadi terkendala. Apalagi, perawat/bidan/dokter tidak mau datang ke rumah mereka jika dipanggil untuk alasan sakit darurat.

j) Akses Pendidikan dan Pengetahuan Teknologi Minim

Anak-anak Suku Laut usia sekolah yang ada di Kepulauan Riau sudah banyak yang bersekolah di SD dan SMP. Namun, itu tidak mewakili mayoritas mereka. Sebab,

masih banyak juga yang putus sekolah bahkan tidak pernah bersekolah karena jarak sekolah dan rumah yang cukup jauh (bahkan beda pulau) serta belum memahaminya masyarakat Suku Laut arti pentingnya sekolah demi masa depannya. Di Pulau Linau, sudah ada SD diperkampungan tersebut meskipun jalan menuju ke sekolah rusak parah. Namun, untuk SMP harus ke Desa Tanjungkelit, jaraknya 10-15 menit naik pompon dengan ongkos Rp 15.000 sekali jalan.

k) Interaksi Sosial dan Jaringan Kerja Terbatas

Interaksi sosial masyarakat Suku Laut yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dengan masyarakat non suku laut masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh akses yang cukup jauh dari pusat kota menyebabkan mereka sulit untuk mobilitas. Sehingga, untuk meninggalkan pemukiman mereka hanya jika ada alasan-alasan sangat penting seperti bekerja, sakit dan belanja. Tempat tinggal secara berkelompok dan lokasi yang jauh dari kelompok lainnya, membuat interaksi dengan kelompok di luar Suku Laut sangat terbatas. Pola pemukiman terpusat pada lokasi yang dekat dengan mata pencaharian mereka.

Sementara itu, interaksi sosial masyarakat terjadi di lingkungan masyarakat Suku Laut dengan sesama mereka dalam in group berlangsung sangat erat. Kontak sosial dalam kelompok Suku Laut dengan bertatap muka terjadi intens dengan in group mereka, sesama Suku Laut. Namun, tidak dengan kelompok di luar kelompok tersebut (out group). Desa Linau Batu dihuni 1-3 suku, yakni mayoritas Suku Laut, 2 orang suku Batak.

Pola perkawinan suku laut dilakukan berdasarkan agama yang dianutnya. Setelah menikah, laki-laki tinggal bersama orang perempuan. Pola pembagian warisan dilakukan sama rata baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Hubungan sosial dengan masyarakat sekitar tidak begitu intens karena mereka suka menyendiri dikarenakan perasaan minder, kesulitan bahasa sehingga sulit berinteraksi dengan penduduk lokal. Jika suku laut mengadakan acara pernikahan, umumnya tidak mengundang suku laut dari pulau lain, hanya mengundang kepala suku dari pulau/dusun lain saja.

Suku laut terdiri dari anggota kelompok yang homogen. Dalam komunitas Suku Laut, umumnya terdiri dari orang-orang Suku laut sendiri yang lahir dan di besarkan di lingkungan tersebut, secara turun temurun. Secara turun temurun pula menempati tempat itu. Interaksi Siuku laut pada akhirnya juga terbatas antar mereka di lingkungan

tempat tinggal mereka. Sedikit sekali menjalin hubungan sosial dengan pihak di luar komunitas mereka, kecuali untuk urusan-urusan tertentu. Pun hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu. Itupun jika memang urusan tersebut mengharuskan mereka keluar dari dusun tersebut atau memang ada pihak lain yang mendatangi mereka. Belanja misalnya, atau mencari ikan, yang mengharuskan mereka untuk keluar dari kampung tersebut. Bukan berarti suku Laut tertutup, mereka telah membuka diri, namun masih terbatas. Biasanya terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan atau pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Jaringan kerja yang terbentuk pada suku laut terbangun secara perlahan. Hanya sedikit orang suku laut yang membangun jejaring kerja dengan pihak di luar komunitas mereka. Belum ditemukan jaringan yang kuat dengan kelompok diluar mereka. Namun, terlihat sudah ada upaya untuk membangun jaringan tadi. Seperti hal nya ketika suku laut mulai menjual hasil tangkapan pada satu tauke. Hal ini terjadi secara berketerusan, dan diikuti oleh anggota suku laut lainnya.

Gagasan Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut

Setelah mengidentifikasi permasalahan masyarakat Suku Laut di Dusun Linau Batu, Desa Tanjungkelit, Kab. Lingga, maka penulis merekomendasikan bentuk pemberdayaan yang bisa dilakukan dengan melibatkan 4 aktor pemberdayaan, seperti pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan masyarakat tempatan. Berikut ini, tabel peran keempat aktor tersebut:

Tabel 1. Peran Empat Aktor dalam Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut

Aktor	Peran dalam Pemberdayaann	Bentuk Output Peran	Fasilitasi
Pemerintah	Formulasi dan Penetapan Policy, Implementasi Monitoring dan Evaluasi Mediasi	Kebijakan: Politik, umum, departemen/sektoral, penganggaran, juknis dan juklak, penetapan indikator keberhasilan, peraturan hukum,	Dana, jaminan, alat, teknologi, jaringan, edukasi
Swasta	Kontribusi pada formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi	Konsultasi dan rekomendasi kebijakan, tindakan dan langkah aksi implementasi, donator.	Dana, alat, teknologi tenaga ahli dan sangat terampil.
Perguruan Tinggi	Kontribusi pada formulasi, dan monitoring.	Konsultasi dan rekomendasi kebijakan, tindakan dan langkah aksi, implementasi, donatur, private investment pemeliharaan	Dana, alat, tenaga ahli terampil.
Masyarakat	Partisipasi dalam formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi.	Saran, input, kritik, rekomendasi, keberatan, dukungan ide dan partisipasi dalam formulasi kebijakan. dana swadaya menjadi obyek.	Tenaga terdidik, tenaga terlatih, setengah terdidik dan setengah terlatih.

Keempat pilar/ aktor pemberdayaan masyarakat Suku Laut tersebut dapat bekerjasama dalam menangani persoalan keterbelakangan. Berikut ini rekomendasi program pemberdayaan yang bisa dilaksanakan:

1) Pembuatan rumah layak huni dengan daya dukung MCK dan penampungan air bersih

Pemerintah	Menyediakan dana melalui APBN (Kemensos Dir KAT), APBD (Provinsi dan Kabupaten), Pemerintah Desa (APBDes) untuk menyediakan sarana MCK dan penampungan air bersih.
Swasta	Konsultasi (menyediakan tenaga ahli), tindakan, donasi (melalui CSR Perusahaan) untuk pembangunan MCK dan air bersih.
Perguruan Tinggi	Konsultasi, rekomendasi kebijakan, tindakan dan langkah aksi, implementasi, kajian/ penelitian.
Masyarakat	Partisipasi dalam pembangunan MCK

2) Bantuan Peralatan kerja untuk melaut modern

Pemerintah	Menyediakan dana melalui APBN (Kemensos Dir KAT), APBD (Provinsi dan Kabupaten), Pemerintah Desa (APBDes) untuk menyediakan peralatan melaut.
Swasta	Konsultasi (menyediakan tenaga ahli), tindakan, donasi (melalui CSR Perusahaan) terkait ketersediaan peralatan melaut yang modern.
Perguruan Tinggi	Kajian/ penelitian, melakukan penyuluhan dan pendampingan terkait penggunaan peralatan melaut modern terutama selama 1 tahun awal.
Masyarakat	Berpartisipasi membina masyarakat Suku Laut menggunakan alat tangkap modern

3) Bantuan fasilitas dan tenaga kependidikan, Kesehatan, Penerangan

Pemerintah	Menyediakan dana melalui APBN (Kemensos Dir KAT), APBD (Provinsi dan Kabupaten), Pemerintah Desa (APBDes) untuk mendirikan sekolah, menyediakan pompong sekolah khusus masyarakat Suku Laut, menyediakan Pustu di perkampungan Suku Laut dan menyediakan listrik.
Swasta	Donasi (melalui CSR Perusahaan) terkait ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Perguruan Tinggi	Memberi motivasi dan sosialisasi agar masyarakat Suku Laut dapat menginternalisasi nilai dan norma sosial, pendidikan, kesehatan.
Masyarakat	Menerima dan Merangkul Masyarakat Suku Laut untuk bersekolah dan menghapus steryotipe masyarakat Suku Laut.

4) Pembinaan Kreatifitas

Pemerintah	Menyediakan dana melalui APBN (Kemensos Dir KAT), APBD (Provinsi dan Kabupaten), Pemerintah Desa (APBDes) untuk pembinaan kreatifitas, peningkatan ekonomi masyarakat.
------------	--

Swasta	Konsultasi (menyediakan tenaga ahli), tindakan, donasi (melalui CSR Perusahaan) terkait pembinaan kreatifitas guna meningkatkan ekonomi masyarakat Suku Laut.
Perguruan Tinggi	Kajian/ penelitian. Menjadikan perkampungan Suku Laut sebagai Desa Mitra/ Desa Binaan. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan sasaran/ target masyarakat Suku Laut.
Masyarakat	Berpartisipasi membina masyarakat Suku Laut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan studi kelayakan pada masyarakat Suku Laut di Dusun Linau Batu, Desa Tanjungkelit, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga ditemukan persoalan sosial, ekonomi, akses, kelembagaan dan kultural yang menyebabkan mereka terpencil dan mengalami kemiskinan meskipun sudah dirumahkan. Adapun persoalan yang dialami masyarakat Suku Laut adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber Air Bersih Minim
- 2) Kurangnya Jumlah dan Buruknya Kondisi Tempat Tinggal
- 3) Perempuan Suku Laut Belum Berdaya
- 4) Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Buta Huruf
- 5) Potensi Sumber Daya Manusia Rendah
- 6) Pranata Politik dan Kelembagaan Adat Lemah
- 7) Tidak Ada Kepemilikan dan Sistem Penguasaan Wilayah
- 8) Pendampingan Pemuka Agama Minim
- 9) Akses Pranata Kesehatan Jauh
- 10) Akses Pendidikan dan Pengetahuan Teknologi Minim
- 11) Interaksi Sosial dan Jaringan Kerja Terbatas

Oleh sebab itu, maka perlu upaya pemerintah untuk lebih memperhatikan Suku Laut agar mendapatkan akses yang sama dalam hal pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengolahan Sumber Daya Alam, Penguatan Kelembagaan, kelengkapan sarana dan prasarana kehidupan. Adapun program yang peneliti rekomendasikan untuk pemberdayaan bagi masyarakat Suku Laut di Dusun Linau Batu, Desa Tanjungkelit, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:

- 1) Pembuatan rumah layak huni dengan daya dukung MCK
- 2) Bantuan Peralatan kerja untuk melaut
- 3) Bantuan fasilitas dan tenaga kependidikan
- 4) Bantuan fasilitas kesehatan

- 5) Bantuan listrik dan air bersih
- 6) Pembinaan Pembinaan Kreatifitas

DAFTAR PUSTAKA

- A Samad Ahmad.1985.*Kerajaan Johor-Riau, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.*
- Afrizal. 2005. *Pengantar Metode Pnelitian Kualitatif: Dari Pengertian Sampai Penulisan Laporan.* Padang: Andalas University Press
- Chyntia Chou. 2009. *The Orang Suku Laut of Riau, Indonesia.* London: Routledge
- Departemen Sosial RI, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- Departemen Sosial RI, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Direktorat Pemberdayaan komunitas Adat Terpencil Tahun I, II, dan III. 2009. *Penguatan Pendamping Sosial Komunitas Adat Terpencil.*
- Dfraft, Richard L. 2002. *Manajemen Edisi Kelima.Jilid Satu.* Jakarta: Erlangga.
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. 2011. *Suku Akit di Pulau Rupa.* Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
- Koentjaraningrat. 1994. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat,* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).
- M.Fadly, Muhammad, *implementasi kebijakanpemberdayaan komunitas adat terpencil di kecamatan bua ponrang kabupaten luvu makasar.* Skripsi Tahun 2012
- Moleong, Lexy. J. 2001, *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muzakkar, abdullah, *perempuan dan kemiskinan;realitas ketidakadilan gender,* jurnal puanri.tahun 2007
- Scott, Jhon, 2011. *Sosiologi The Key Concepts.*Jakarta: PT Raja Grafindo..
- Sri Wahyuni, Dampak Pembinaan Kesejahteraan Sosial Terhadap Peningkatan Pendapatan Suku Sakai Oleh Perusahaan Caltex di Duri, Skripsi tahun 2000
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial.* Bandung. PT. Refika Aditama
- Usman, Sunyoto. 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Zen, Mohammad.2009. *Orang Laut Studi Etnopedagogi.* Jakarta: Yayasan Bahari Nusantara.